BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di dunia. Globalisasi secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan sebuah interaksi. Interaksi yang dimaksud antar masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah dalam menghadapi globalisasi tersebut memberikan wewenangnya pada daerah. Wewenang diberikan karena setiap daerah memiliki otonomi masing-masing.

Otonomi daerah mengharuskan setiap daerah menggali potensi yang dimiliki daerahnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Otonomi daerah memiliki tujuan dalam menggali potensi yang dimiliki daerahnya. Tujuannya adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Salah satunya mengenai urusan rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 10 huruf h) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun Provinsi atau Kabupaten/Kota menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan

negara-negara Asia Pasifik dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sejak tahun 2002 bersamaan dengan penerbitan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) pada tingkat nasional yang dilakukan setiap tahun, diterbitkan pula Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penerbitan SLHD, jauh sebelumnya pemerintah daerah telah menyusun Neraca Lingkungan Hidup (NLH) yang dimulai sejak tahun 1982 yang pada tahun 1986 berubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah, dan mulai tahun 1994 berubah lagi menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak tahun 2002 didasarkan pada surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun laporan SLHD dengan mengacu kepada pedoman umum penyusunan laporan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Mulai tahun 2008, buku laporan status lingkungan hidup di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota disebut sebagai laporan Status Lingkungan Hidup Provinsi (SLH Provinsi) atau laporan Status Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (SLH Kabupaten/Kota).

Penyusunan Laporan SLH bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kaitan kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi lingkungan; sosialisasi dan transparansi berbagai usaha pengelolaan lingkungan hidup; tersedianya informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, kebijakan

maupun intervensi program yang rasional, holistik dan terpadu. Dilaksanakannya penyusunan Laporan SLH dapat dicapai penyusunan basis data sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; penyusunan laporan SLH Kabupaten Bandung Tahun 2004.

Data-data yang diperoleh dalam penyusunan laporan SLH diperoleh dari semua SKPD se-Kabupaten Bandung. Laporan SLH menginformasikan kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bandung, yang sedang menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Kondisi yang sangat kompleks mengenai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), air baku dan air bersih, sistem pengolahan sampah, limbah domestik, limbah industri, dan penanggulangan lahan kritis.

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Bandung, menemukan 10 perusahaan yang membuang limbah batu bara sembarangan. Limbah batu bara dibuang disekitar permukiman penduduk dan telah mencemari Sungai Citarum. Pengolahan Limbah B3 merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. BPLH Kabupaten Bandung meminta bantuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). IPAL diharapkan mengelola lebih optimal, agar limbah buangan bisa sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Standar baku mutu menjelaskan limbah tersebut saat dibuang tidak akan membahayakan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar industri atau tempat pembuangan tersebut.

Kawasan pengolahan limbah B3 sudah disiapkan oleh Pemerintah kabupaten Bandung. Pemerintah saat ini tinggal menunggu amdal dari KLH. Pemerintah memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan secara

keseluruhan, sehingga Pemerintah lebih banyak mengandalkan laporan-laporan dari masyarakat. Langkah ke depan informasi tidak hanya berupa laporan, tetapi berupa sebuah sistem informasi. Keputusan ini sudah ditetapkan oleh KLH, bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki sistem informasi. Sistem informasi diterapkan agar masyarakat dapat ikut serta menjaga lingkungannya. Sistem informasi yang akan diterapkan oleh BPLH adalah SIM Lingkungan.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan perlu direalisasikan, karena bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan Kabupaten Bandung. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dapat membantu *stakeholder* dalam membuat kebijakan, program, serta kegiatan untuk mendorong terjadinya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam mengatasi masalah lingkungan. Prosedur pembuatan SIM Lingkungan berdasarkan surat keputusan dari KLH. KLH memberikan wewenang kepada BPLH, kemudian setelah BPLH memiliki kesiapan dan membutuhkan aplikasi sistem informasi, mengajukan ke Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (Bapapsi). Bapapsi kemudian membuatkan aplikasi sistem informasi tersebut, dan selanjutnya BPLH sendiri yang mengembangkan dan menganggarkan. Sejauh ini, pembuatan SIM Lingkungan baru mencapai tahap kajian kerangkanya saja. Pengkajian kerangka apabila sudah sesuai dengan konsep sistem informasinya, maka akan diaplikasikan ke dalam bentuk *software*.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ini diharapkan dapat menjadi alat ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bandung. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan merupakan media pengintegrasian kepentingan

lingkungan dalam kebijakan di berbagai sektor pembangunan. SIM Lingkungan diharapkan dapat mengintegrasikan semua pengambilan keputusan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ke depan dapat menjadi fasilitas kelayakan lingkungan bagi rencana kegiatan dan usaha.

Sasaran pembuatan kebijakan SIM Lingkungan ini adalah pelaksanaan perumusan kebijakan, pembinaan, pengawasan penerapan manajemen lingkungan, penyusunan rencana dan program adipura, serta penyelenggaraan program adipura. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan, berfungsi sebagai pelaksanaan proses penilaian dan persetujuan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan pelaksanaan dokumen lingkungan yang telah diterbitkan persetujuannya. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan diterapkan agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah. Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan adalah salah satu bentuk penerapan *e-Government.* Tipe *e-Government* yang lebih tepat yaitu *government to citizen* (kerjasama antar instansi dengan masyarakat).

E-government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. Mekanisme tersebut harus dipenuhi dalam menentukan kesiapan suatu daerah. Daerah dalam menerapkan e-*Government* paling tidak harus memiliki berbagai prasyarat. Prasyarat tersebut dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan

teknologi informasi, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigmanya.

Pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH Kabupaten Bandung, masih mengalami berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan sistem informasi, tidak selalu diiringi dengan kesiapan aparatur pemerintah. SIM Lingkungan diharapkan mampu menghasilkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, dalam menghasilkan informasi mengenai lingkungan di BPLH Kabupaten Bandung.

Perkembangan teknologi informasi sangat penting di pemerintahan, dalam pengambilan suatu keputusan dan proses pengembangan sumber daya aparatur. Aparatur akan lebih efektif menjalankan tugasnya, apabila mendapatkan keahlian di bidang teknologi informasi tersebut. Penggunaan teknologi pada lingkungan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Informasi merupakan sumber daya yang penting dalam proses manajemen. Informasi dalam sebuah organisasi pemerintahan dilakukan melalui suatu interaksi. Interaksi dilakukan antar pegawai di lingkungan pemerintahan. Interaksi dilakukan untuk mendapatkan suatu kebijakan. Kebijakan yang terkait dengan kajian aparatur BPLH adalah pembuatan kebijakan SIM Lingkungan.

Berdasarkan kendala di atas, untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya aparatur suatu instansi atau lembaga diperlukan penempatan pegawai yang professional dibidangnya, yang sesuai dengan

keahliannya. Pegawai yang professional di bidang inilah yang menempatkan pegawai sesuai dengan prosedur.

Prosedur akan terbentuk sesuai dengan iklim atau suasana kerja yang harmonis. Pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas yang dilimpahkan kepadanya, merasa nyaman dan cocok dengan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Prosedur standar dan sistem pengawasan belum efektif, karena aparatur belum bisa mengatur pegawainya. Aparatur dituntut untuk mengarahkan pegawai yang professional di bidangnya.

Pengoptimalisasian kinerja aparatur melalui SIM Lingkungan bertujuan untuk membangun suatu mekanisme yang efektif agar komunikasi antara aparatur dengan masyarakat dapat terjalin baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul skripsi ini **"Analisis Pembuatan Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Lingkungan (SIM Lingkungan) dalam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Badan Perpustakaan, Arsip Dan Pengembangan Sistem Informasi (Bapapsi) Kabupaten Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengkajian kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung?

2. Bagaimana proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana proses komunikasi kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengkajian kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses komunikasi kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi diri sendiri, yaitu dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan manfaat tentang makna dari Analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.
2. Bagi keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan dapat berguna bagi Ilmu Pemerintahan. Bidang ilmu yang dipelajari adalah Teori dan Analisa Kebijakan Pemerintahan serta Sistem Informasi Manajemen Daerah. Penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Bagi kegunaan praktis, yaitu melalui perumusan tentang Analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan BPLH. Sumbangan pemikiran ini khususnya dalam menggunakan, mengatur, dan mengendalikan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan analisis sebagai “prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis” (dalam Mangkunegara, 2001:13). Berdasarkan pengertian tersebut maka analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Negara memerlukan adanya suatu kebijakan, begitu pun dengan pemerintah. Kebijakan ditujukan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Analisis Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial* berpendapat bahwa “kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”. (Suharto, 2008:7).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Charles O. Jones mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), ”*Kebijakan adalah sebagai seperangkat ciri-ciri yang dikhususkan dan diidentifikasi melaui riset”. (Jones, 1994:47).

Berdasarkan pengertian di atas, suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang

terarah. Kebijakan mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu sama lain, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan.

Dunn mengemukakan pengertian analisis kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurutnya analisis kebijakan adalah ”suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik”. (Dunn, 2003:43). Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para ahli di atas, maka analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dunn dalam bukunya *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu:

1) Proses pengkajian kebijakan, menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2) Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
3) Proses komunikasi kebijakan, merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

(Dunn, 2003:1).

Analisis kebijakan merupakan suatu proses kognitif, sementara pembuatan kebijakan bersifat politis. Keberadaan analisis kebijakan disebabkan banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak memecahkan masalah, bahkan menciptakan masalah baru. Analisis kebijakan, diperlukan untuk mengetahui kebijakan apa yang cocok dalam proses pembuatan kebijakan.

Kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Analisis dapat dikembangkan di awal pembuatan suatu kebijakan ataupun di akhir penerapan kebijakan.

Teori SIM Lingkungan perlu dilengkapi. Oleh karena itu, akan diuraikan mengenai pengertian sistem, informasi, dan Manajemen. M. Khoirul Anwar dalam buku *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah* menjelaskan pengertian sistem, yaitu ”seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan” (Anwar, 2004:4). definisi informasi yang dikemukakan oleh Wahyono, yaitu:

> “Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan”. (Wahyono, 2004:3)

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, dan suatu informasi mengambarkan kejadian-kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan penjelasan definisi-definsi di atas, sistem informasi merupakan data yang diproses yang terdiri dari unsur-unsur seperti masukan, pengolahan serta keluaran yang tersusun secara sistematis. Sistem informasi merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan. karena sistem informasi, bertujuan untuk menyajikan suatu informasi, yang pada akhirnya informasi tersebut berguna dalam pengambilan suatu keputusan.

Pengertian manajemen menurut Hasibuan, Malayu S.P, dalam bukunya *Manajemen Sumber Daya Manusia* adalah ”ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu". (Hasibuan, 2006:255). Berdasarkan pengertian di atas manajemen terdiri dari adanya sumber daya yang merupakan keberhasilan proses dan merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan dalam hal ini mengenai kebijakan pembuatan SIM Lingkungan.

Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang dibuat oleh manusia. Sistem informasi manajemen, di dalamnya terdapat kumpulan berbagai komponen yang berbasis komputer. Komponen tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk menghasilkan informasi bagi pemakai. SIM Lingkungan merupakan bagian dari hasil pengolahan data. SIM Lingkungan memberikan dampak baik bagi kondisi lingkungan. Sistem informasi tersebut efektif sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kebijakan adalah suatu program yang akan diterapkan oleh BPLH ke dalam SIM Lingkungan. SIM Lingkungan diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup, dengan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
2. Analisis pembuatan kebijakan adalah suatu proses yang dinamis. Proses tersebut berpengaruh terhadap masyarakat, dalam memberikan atau menghasilkan informasi. Informasi tersebut dapat dijadikan landasan dalam

pembuatan kebijakan dari sebuah hasil kerja berbasis teknologi informasi di BPLH.

3. Proses pengkajian kebijakan, meliputi:
    a. Metodologi adalah proses dalam menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH.
    b. Informasi adalah dasar pengetahuan dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH.
    c. Prosedur adalah proses yang menggambarkan keterkaitan antara metode-metode dan teknik-teknik analisis kebijakan dalam merencanakan sistem informasi yang akan diterapkan BPLH Kabupaten Bandung.
4. Proses pembuatan kebijakan adalah proses politik yang berlangsung dalam menentukan langkah-langkah pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH Kabupaten Bandung.
    a. Perumusan Masalah adalah proses yang membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan.
    b. Peramalan adalah proses yang dapat menguji masa depan yang potensial, dan secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dari pembuatan kebijakan SIM Lingkungan tersebut.

c. Rekomendasi adalah pengetahuan yang relevan dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Pemantauan adalah proses membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi pada setiap tahap kebijakan dari pembuatan kebijakan SIM Lingkungan yang akan diterapkan.

e. Evaluasi adalah proses penilaian. Dimana hal-hal apa yang kurang dari pembuatan kebijakan SIM Lingkungan akan dibahas dalam tahap ini.

5. Proses komunikasi kebijakan adalah proses menentukan data-data masukan, yang akan digunakan untuk mengoperasikan SIM Lingkungan dan diprioritaskan pada lingkungan hidup masyarakat.

   a. Dokumen adalah dokumen yang berisi pengetahuan dan keterampilan dalam mensitesakan, memaparkan, dan meringkas informasi ke dalam SIM Lingkungan.

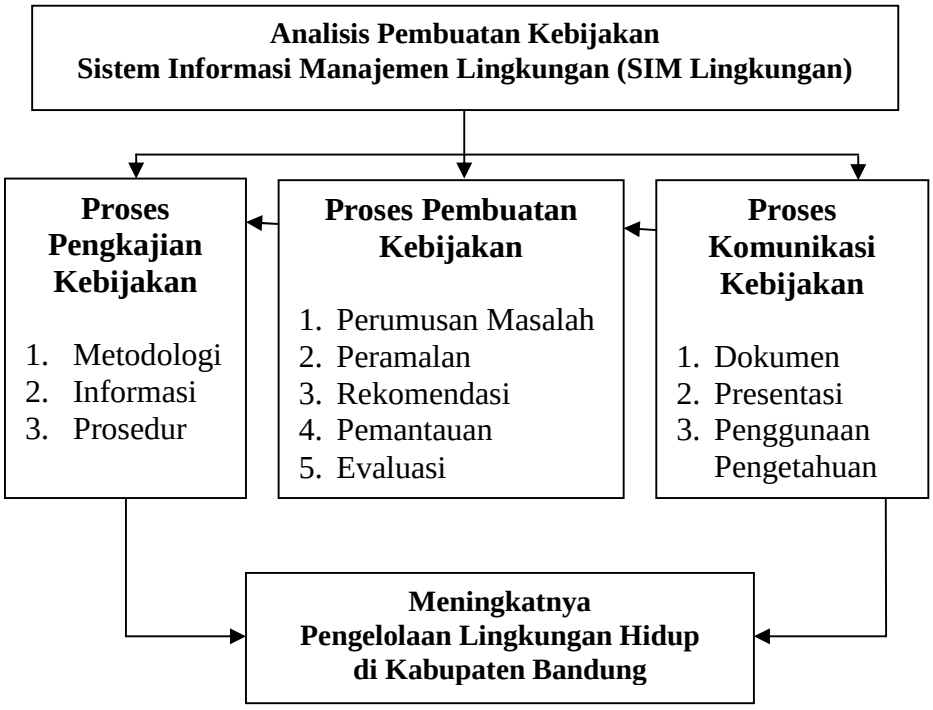
   b. Presentasi adalah pemaparan kebijakan dalam bentuk lampiran bukan secara lisan. Presentasi merupakan proses akhir keberhasilan birokrat pelaksana dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan.

   c. Penggunaan pengetahuan adalah untuk memperbaiki kebijakan dengan cara menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan pembuatan kebijakan SIM Lingkungan.

6. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu inovasi yang akan diterapkan di BPLH Kabupaten Bandung. Sistem informasi tersebut dinamakan SIM Lingkungan yang bertujuan untuk memberikan data kondisi lingkungan kepada masyarakat yang sedang menjadi sorotan berbagai pihak. Kondisi tersebut mengenai pencemaran limbah industri Bahan berbahaya dan beracun (B3), limbah domestik, sampah, lahan kritis di Kabupaten Bandung.

Secara singkat, kerangka pemikiran di atas dapat dilihat secara jelas dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif menurut Soehartono dalam bukunya *Metode Penelitian*

Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya) dapat diartikan sebagai berikut:

> "Metode penelitian deskriptif adalah metode untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih" (Soehartono, 2002:35).

Peneliti memilih metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan. Adapun pengertian metode kualitatif menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan pengertian kualitatif, sebagai berikut:

> "Metode Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*" (Sugiyono, 2005:1).

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang memberikan gambaran dan uraian yang jelas, sistematis, faktual dan akurat dalam sebuah penelitian. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam sebuah penelitian yang mengutamakan kualitas data. Data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat (tidak menggunakan analisis statistika).

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

   Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi. Adapun sumber yang dimaksud adalah seperti yang tertulis dalam daftar pustaka dan sumber-sumber lain yang relevan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Peninjauan yang dilakukan langsung pada BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung yang menjadi objek penelitian dengan tujuan yaitu, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date*, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

   a. Observasi (*Observation*)

      Observasi adalah cara menghimpun data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian (Muhammad, 2003:35). Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bandung tepatnya di BPLH dan Bapapsi. Lokasi penelitian tersebut berhubungan dengan pembuatan kebijakan SIM Lingkungan.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Yaitu teknik penelitian yang paling sosiologis dari semua teknik-teknik penelitian sosial. Wawancara berasal dari interaksi verbal antara peneliti

dan responden. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.

Metode wawancara dilakukan agar peneliti dapat memperoleh keterangan yang sedalam-dalamnya tentang suatu masalah yang diteliti. Wawancara akan lebih dipercaya kebenarannya, karena salah tafsiran dapat diperbaiki sewaktu wawancara dilakukan. Metode wawancara membuat peneliti dapat memperoleh bahan-bahan, dimana peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diselidikinya.

1.6.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik ini adalah siapa yang akan diambil sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpul data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Menurut James A. Black teknik *sampling purposive* adalah :

> "Teknik Sampling Purposive adalah salah satu cara yang diambil peneliti untuk memastikan, bahwa unsur tertentu dimasukan ke dalam sampel. Tingginya tingkat selektivitas yang ada pada teknik ini akan menjamin semua tingkatan yang relevan direpresentasikan dalam rancangan penelitian tertentu". (Black, 2001: 264).

Sampel *Purposive* sering disebut sampel *judgmental* karena peneliti menguji pertimbangan-pertimbangan untuk memasukan unsur yang dianggap

khusus dari suatu populasi tempat mencari informasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang berkaitan dengan analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung.

Informan yang berhasil diwawancarai berkaitan dengan analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di BPLH dan Bapapsi Kabupaten Bandung yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program BPLH Kabupaten Bandung, Odang, ST. Beliau merupakan orang yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dalam analisis pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung.
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Said Sadiman, ST., M.Si, sebagai orang yang mengetahui keseluruhan masalah analisis dampak lingkungan dalam pembuatan kebijakan SIM Lingkungan di Kabupaten Bandung.
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Windya Wardhani, ST., MT. Beliau adalah orng yang merumuskan kebijakan penetapan air dan kualitas air pada sumber air di Kabupaten Bandung.
4. Kepala Sub Bidang Penerapan Manajemen Lingkungan, Ir. Feby Siti Zubaedah, SP, M.Si sebagai orang yang menyusun rencana dalam penerapan manajemen lingkungan di BPLH Kabupaten Bandung.
5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Limbah Padat dan B3, Muhammad Syafei, ST. Beliau merupakan orang yang memberikan rekomendasi izin lokasi pengolahan limbah B3 kepada industri-industri terkait.

6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Ir. Akun Supian. Informan ini merupakan orang yang memiliki kewenangan merumuskan kebijakan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan / atau lahan di Kabupaten Bandung.
7. Kepala Sub Bidang Pencemaran air dan udara yaitu Ir. Eddy Sopyan. D. Beliau bersedia di wawancara, karena beliau yang memegang kendali permasalahan pencemaran air dan udara ini.
8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapapsi, Drs. Sartono. Informan ini dipilih karena lebih mengetahui pengadaan, pemutasian, dan kesejahteraan pegawai yang ada di Bapapsi Kabupaten Bandung, serta bersedia di wawancara dan memberikan data yang peneliti butuhkan.
9. Kepala Bidang Pengolahan dan Pengembangan Informasi, Elly Agustini, S.Kom.MM.
10. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi & Telematika, Ratna Nurhayati, ST. Informan ini merupakan orang yang lebih paham dalam mengoperasikan aplikasi *software* baik yang bersifat intranet maupun internet.

1.6.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriftif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai “strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana *(setting)* tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori

muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar *(grounded)* dalam data" (Suyanto, 2005:183).

Menurut Sugiyono dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan ada tiga unsur dalam kegiatan proses analisis data, sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisis dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.
2. *Data Display* (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
3. *Conclusion Verification* (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat.

(Sugiyono, 2005:92-99)

Peneliti menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk di interprestasikan. Data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung, yang beralamatkan di Jalan Raya Soreang km : 17 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari observasi lokasi penelitian sampai dengan penelitian berakhir, antara lain:

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Waktu / Kegiatan	Tahun 2009		Tahun 2010						
	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul
Observasi lokasi Penelitian	■								
Pengajuan Judul Penelitian		■							
Penyusunan Usulan Penelitian			■						
Seminar Usulan penelitian						■			
Pengajuan surat ke tempat penelitian				■					
Pelaksanaan penelitian					■	■	■	■	
Penulisan Skripsi					■	■	■	■	■
Sidang Skripsi									■